



Buletin Parlementaria



3 UU RPJPN
2025 -2045
Disahkan



4 APBN
Dimanfaatkan Bagi
Kemakmuran Rakyat



**Pengalihan
Kuota Haji Dinilai
Menyalahi Aturan**



**Kemenag
Jangan Zalim
PHK Pekerja
RS Haji Jakarta**



Nomor 1308/1/IX/2024 September 2024



9 772614 339005



Dukung Indonesia Bebas TBC 2029



FOTO: RUN/PDT

Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena usai peluncuran kaukus Tuberkulosis.

Presiden RI Joko Widodo menargetkan Indonesia Bebas Tuberkulosis (TBC) pada tahun 2030. Selaras dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan akan mendukung penuh setiap usaha untuk memerangi TBC di Indonesia.

Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi penyumbang terbesar kasus penyakit TBC di dunia. Secara global, korban TBC yang meninggal dunia mencapai 1,3 juta orang, di mana dua pertiganya berasal dari Indonesia.

"Kami ingin kasus (penyakit TBC) ini bisa ditekan. Komisi IX sebagai

'leading sector' akan mendukung dan mempersiapkan berbagai kemungkinan agar setiap langkah nyata yang dilakukan menjadi efektif terlaksana. Jadi, konkret," ungkap Melki usai peluncuran Kaukus Tuberkulosis di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

Ia pun menekankan program pemberantasan kasus TBC ini, juga akan berlanjut pada pemerintahan baru mendatang, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, pemerintahan baru ini menargetkan bahwa akan tidak ada kasus TBC pada tahun 2029.

"Pembentukan kaukus ini bukan sekadar seremonial saja. Kami akan mendukung pemerintah dan menjalin (koordinasi) lintas sektor supaya target ini bisa tercapai. Kami selaku Komisi IX DPR akan mengawasi setiap kebijakan yang dibuat dan diterapkan," tandas Politisi Fraksi Golkar itu. [um/rdn](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya

UU RPJPN 2025-2045 Disahkan



FOTO : JKA/DPD

Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Perindustrian dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menjadi undang-undang (UU) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menjadi undang-undang (UU).

“Apakah Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RUU RPJPN) 2025-2045 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Perindustrian dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel yang disusul jawaban setuju dari para peserta rapat paripurna yang hadir di Gedung

Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Beberapa saat sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang juga sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU RPJPN 2025-2045, Achmad Baidowi melaporkan kepada Paripurna bahwa pembahasan RUU RPJPN 2025-2045 telah menyepakati materi muatan yang terdiri dari enam bab, 21 pasal, dan satu lampiran. Materi muatan RUU tentang RPJPN 2025-2045 tersebut sebagai dasar hukum, pedoman pembangunan nasional, serta pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan nasional.

 **ayu/rdn**



Biro Pemberitaan Parlemen



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibrunukhaid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P. Ridwan Budiman, S.I.P. Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,

Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos,

Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nachren Ivan, S.I.Kom,

Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Saveria Sa'diyah, S.I.Kom,

Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi

Setianto, Taufan Syahrullu, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimmbani,

Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie,

Balggsy Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien,

Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Ruri Sari Budianti, Arief Rachman,

R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie,

Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,

Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapny



APBN Dimanfaatkan Bagi Kemakmuran Rakyat



FOTO: DEP/PTD

Anggota DPR RI Adisatrya Suryo Sulistio pada Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangan yang telah disampaikan Presiden RI pada 16 Agustus 2024, Fraksi PDI-Perjuangan yang diwakili oleh Anggota DPR RI Adisatrya Suryo Sulistio menyatakan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU tentang APBN TA 2025. Adapun pemanfaatannya diharapkan untuk kemakmuran rakyat.

“Sesuai amanat konstitusi, APBN adalah untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan APBN 2025 harus dapat menunjukkan kehidupan rakyat yang lebih baik, lebih mudah dalam segala urusan dan sejahtera,” ungkapnya pada Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

RAPBN Tahun Anggaran 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan. Untuk itu, Pemerintahan yang baru tetap diberikan ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P. Pemerintah pun

diharuskan dapat memastikan bahwa Belanja Negara harus semakin berkualitas, efektif dan efisien.

“Belanja Pemerintah harus menghasilkan kinerja yang berprestasi, bukan hanya sekedar menghasilkan output kegiatan, laporan, dokumen dan lain sebagainya. Setiap program harus dapat menunjukkan prestasi dalam melakukan transformasi, reformasi, penguatan dan lain sebagainya bagi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat mendapatkan pelayanan dari negara,” jelasnya.

gal/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Akselerasi Ekonomi untuk Permudah Pemerintahan Selanjutnya



FOTO : JKA/PDT

Anggota DPR RI Agung Widyantoro saat membacakan Pandangan Fraksi atas RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang telah mengakomodir program Presiden dan Wakil Presiden terpilih berikutnya yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025. RAPBN 2025 yang memiliki tema 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan' dinilai telah cukup komprehensif dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada.

"Akselerasi pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk memudahkan pemerintahan selanjutnya dalam melanjutkan dan menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan yang telah diinisiasi sebelumnya," ujar Agung Widyantoro mewakili Fraksi Partai Golkar saat membacakan Pandangan Fraksi atas RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Fraksi Partai Golkar memberikan sejumlah apresiasi terhadap RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya. Apresiasi ini diberikan atas adanya peningkatan anggaran

pendidikan sebesar Rp722,6 T serta anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 T. "Peningkatan anggaran perlinsos ini sangat dibutuhkan untuk membantu serta melindungi lapisan masyarakat yang paling membutuhkan di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih melanda dunia," harapnya.

Dari sisi indikator ekonomi makro, Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi langkah Pemerintah yang menargetkan laju inflasi pada level 2,5 persen. Namun untuk mencapai target tersebut, membutuhkan kerja keras serta kerja sama yang solid antar *stakeholder* terutama otoritas fiskal dan moneter. **gal/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dukung Desain Kebijakan APBN Tahun 2025



FOTO: JKA/PDT

Anggota DPR RI Sri Meliyana saat menyerahkan Pandangan Fraksi Gerindra atas RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/08/2024).

Fraksi Partai Gerindra mendukung desain kebijakan APBN Tahun 2025 dengan tema 'Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan'. Desain kebijakan Fraksi Partai Gerindra tersebut berfokus untuk mendukung akselerasi pembangunan SDM yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah serta peningkatan investasi, penguatan daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Fraksi Partai Gerindra juga mengapresiasi kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memberikan ruang terhadap pemerintahan yang baru di dalam menentukan program-program kedepannya untuk kemajuan Indonesia.

"Legasi yang bagus sehingga Pemerintah baru nanti bisa langsung bekerja merealisasikan janji-janji kampanyenya dalam Pilpres 2024. Kami mengapresiasi atas dukungan keluasaan anggaran untuk program-program unggulan pemerintahan

yang akan datang," tutur Sri Meliyana saat membacakan Pandangan Fraksi Gerindra atas RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Menanggapi RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya, Fraksi Partai Gerindra mendukung Pemerintah untuk lebih serius melakukan revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian. [gal/rdn](https://gal.rdn)

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Beri Pondasi Kuat, Jamin Keberlanjutan Pembangunan



FOTO : RSB/PDT

Anggota DPR RI Fauzi Amro saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai NasDem atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

APBN 2025 menandai babak krusial dalam proses transformasi ekonomi di Indonesia. Pasalnya, APBN 2025 menjadi tahun pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045. Untuk itulah, Fraksi Partai NasDem berharap APBN 2025 memberikan pondasi yang kuat dalam menjamin keberlanjutan pembangunan.

"APBN 2025 juga dituntut untuk menyiapkan ruang fiskal yang optimal sehingga pada tahun pertama,

pemerintahan baru dapat langsung melaksanakan program-program prioritasnya," kata Politisi Fraksi Partai NasDem Fauzi Amro, saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai NasDem atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Beberapa catatan yang diberikan Fraksi Partai NasDem terhadap RAPBN 2025 beserta Nota Keuangannya, diantaranya pada asumsi dasar makro, Fauzi mengatakan pertumbuhan

ekonomi sebesar 5,2 persen sudah cukup realistis. Target inflasi 2,5 persen pun diapresiasi karena dianggap cukup realistis dan relevan meskipun tantangannya tidak mudah.

Kemudian, pada target rata-rata nilai tukar rupiah Rp16.100 per Dolar AS, Fraksi Partai NasDem menilai target tersebut cukup memadai. Fraksi Partai NasDem memandangi target suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,1 persen pun cukup beralasan. Selain itu, penetapan asumsi harga minyak mentah Indonesia USD82 per barel juga dinilai cukup realistis. **bia/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Menstimulasi dan Berkontribusi Optimal Bagi Kesejahteraan Umum



FOTO: GER/PDT

Anggota DPR RI Netty Prasetya (kanan) saat menyerahkan Pandangan Fraksi atas RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Fraksi PKS DPR RI yang diwakili oleh Anggota DPR RI Netty Prasetya mengungkapkan bahwa Fraksi PKS sangat optimis dan percaya bahwa dengan semangat Kemerdekaan RI semua tantangan dan permasalahan Indonesia.

Maka dari itu menurutnya, APBN 2025 harus mengarah dan sampai kepada tujuan-tujuan Indonesia seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

"APBN 2025 harus dapat menstimulus dan berkontribusi optimal serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia," ujar Netty dalam rapat Paripurna di Ruang rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8).

Selain itu, F-PKS menyebut RAPBN tahun 2025 masih membutuhkan penajaman. Hal itu agar RAPBN

nantinya lebih sehat, kredibel, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat. "Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1," lanjut politisi yang juga Anggota Komis IX DPR RI ini.

Sejumlah catatan disampaikan oleh F-PKS yang berfokus pada Asumsi Makro Ekonomi, Indikator Kesejahteraan, Penerimaan Negara, belanja Pemerintah, Transfer ke Daerah, serta mengenai Defisit dan Pembiayaan. **hal/aha**



Apresiasi Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2025



FOTO: DEP/PTD

Anggota DPR RI Muhammad Aras saat menyerahkan Pandangan Fraksi PPP atas RUU APBN TA 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Fraksi PPP DPR RI yang dibacakan oleh anggota DPR RI Muhammad Aras mengapresiasi pemerintah yang telah menyusun kebijakan fiskal tahun anggaran 2025 dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam RAPBN 2025. Menurutnya, RAPBN Tahun 2025 ini akan mengantarkan proses transisi kepemimpinan menuju pemerintahan baru.

“Dimana untuk mensukseskan kebijakan tersebut, Pemerintah berencana menempuh 2 (dua) strategi

utama yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah-panjang,” ujar Aras dalam Rapat Paripurna di Ruang rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8).

lebih lanjut untuk mensukseskan RAPBN tersebut, F-PPP dalam kesempatan itu meminta Pemerintah agar tetap menjaga keberlanjutan reformasi baik dari sisi pendapatan dan belanja, serta melakukan berbagai inovasi untuk pembiayaan defisit APBN Tahun Anggaran 2025

“Oleh sebab itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan

secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi penerimaan negara, perbaikan sisi belanja dan pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati,” ujar Aras.

Selain itu, F-PPP juga meminta Pemerintah untuk terus mengantisipasi dampak perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa. Fraksi PPP juga meminta Pemerintah harus selalu waspada menavigasi dan memitigasi tekanan eksternal dan mengelola stabilitas Rupiah.

ha/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Jadi Pilar Penting Jaga Keberlanjutan



FOTO: JKA/PDT

Anggota DPR RI Rizki Sadig menyerahkan pandangan Fraksi PAN.

Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan pidato tentang RAPBN 2025 dan nota keuangannya, pada Jumat (16/8) lalu. Menyampaikan pandangan umum Fraksi PAN atas RAPBN 2025 beserta nota keuangannya, Politisi PAN Ahmad Rizki Sadig mengatakan Fraksi PAN meyakini arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang.

“Fraksi PAN berharap agar

RUU APBN beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 benar-benar dapat menjadi instrumen fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan ekonomi yang berkeadilan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mempersempit ketimpangan sosial dan ekonomi, serta membuka lapangan kerja bagi seluruh anak bangsa,” kata Rizki Sadig dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Adapun beberapa catatan Fraksi PAN yang disampaikan Rizki Sadiq,

diantaranya adalah pada pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 5,2 persen, Fraksi PAN menilai target tersebut bersifat moderat dan realistis. Inflasi sebesar 2,5 persen, dinilai merupakan target yang cukup realistis.

“Namun pemerintah tetap harus mengantisipasi diberlakukannya kenaikan PPN menjadi 12 persen, sebagaimana amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada awal tahun 2025. Karena hal itu akan berpotensi mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat, sehingga akan meningkatkan angka inflasi yang cukup signifikan,” jelas Rizki. **bia/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Usul ke Pemerintah, Tingkatkan Target Pertumbuhan



FOTO: JKA/PDT

Anggota F-PKB DPR RI Ratna Juwita Sari saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Fraksi PKB DPR RI berikan catatan terkait pidato Presiden Republik Indonesia pengantar RAPBN 2025 beserta nota keuangannya. Fraksi ini menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dapat dinaikkan.

F-PKB DPR RI mengusulkan agar target tersebut bisa dinaikkan di angka 5,3% sebagaimana yang telah diraih pada masa pandemi covid-19 di Tahun 2022. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan

Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Secara khusus, ungkap Ratna, F-PKB meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada investasi baik *foreign direct investment* maupun *domestic direct investment*. Tujuannya, agar mampu memberikan nilai tambah yang signifikan khususnya pada penyerapan tenaga kerja.

Disisi lain terkait tingkat yang ditargetkan berada di kisaran 7 sampai 8% dan rasio gen sebesar 0,379 sampai

0,382%, F-PKB sangat mendukung untuk menjaga tingkat kemiskinan di angka 7%. Namun demikian, tandasnya, F-PKB menyangkan J rasio yang stagnan bahkan cenderung meningkat. Hal tersebut, ungkap Ratna, menandakan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia.

Sehingga, F-PKB meminta agar pemerintah meningkatkan pemerataan kesejahteraan. "Yang bertujuan untuk menekan terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi sekaligus memperkuat kohesi sosial rakyat masyarakat," tutur Ratna. **pun/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Beri Ruang Pelaksanaan Program Selanjutnya



FOTO: JIKAPDOT

Anggota DPR RI Vera Febyanthy menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat.

Sebagaimana telah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Tahunan DPR RI-DPD RI 16 Agustus, APBN Tahun Anggaran 2025 disusun pada masa transisi kepemimpinan Presiden Jokowi kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sehingga, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menilai penyusunan kebijakan setiap kebijakan diharapkan memberikan ruang kepada pelaksanaan program kebijakan Pemerintah selanjutnya.

Demikian disampaikan Anggota

DPR RI Vera Febyanthy saat penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

"Kebijakan yang disusun dalam APBN 2025 harus senantiasa bisa menjawab tantangan baik ekonomi politik dalam negeri maupun global serta menyesuaikan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2030 yang akan disusun untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi

nasional," ujar Vera.

Lebih lanjut, Fraksi Partai Demokrat menekankan pengelolaan APBN 2025 yang bijaksana berdasarkan sejumlah rencana kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RAPBN 2025. Tak hanya itu, Fraksi Demokrat menekankan pemerintah harus menjaga rasa aman dan keadilan di masyarakat dalam situasi transisi kepemimpinan baik transisi kepresidenan maupun transisi pemimpin di daerah yang akan dilaksanakan melalui Pilkada serentak pada November 2024.

 pun/aha



Usul ke Pemerintah, Tingkatkan Target Pertumbuhan



FOTO: FHN/PDT

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Fraksi PKB DPR RI berikan catatan terkait pidato Presiden Republik Indonesia pengantar RAPBN 2025 beserta nota keuangannya. Fraksi ini menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dapat dinaikkan.

F-PKB DPR RI mengusulkan agar target tersebut bisa dinaikkan di angka 5,3% sebagaimana yang telah diraih pada masa pandemi covid-19 di Tahun 2022. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan

Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Secara khusus, ungkap Ratna, F-PKB meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada investasi baik *foreign direct investment* maupun *domestic direct investment*. Tujuannya, agar mampu memberikan nilai tambah yang signifikan khususnya pada penyerapan tenaga kerja.

Disisi lain terkait tingkat yang ditargetkan berada di kisaran 7 sampai 8% dan rasio gen sebesar

0,379 sampai 0,382%, F-PKB sangat mendukung untuk menjaga tingkat kemiskinan di angka 7%. Namun demikian, tandasnya, F-PKB menyangkan J rasio yang stagnan bahkan cenderung meningkat. Hal tersebut, ungkap Ratna, menandakan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia.

Sehingga, F-PKB meminta agar pemerintah meningkatkan pemerataan kesejahteraan. "Yang bertujuan untuk menekan terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi sekaligus memperkuat kohesi sosial rakyat masyarakat," tutur Ratna. **pun/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pemerintah Berkomitmen Tindaklanjuti Rekomendasi BPK



FOTO: FHN/PDT

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel menerima tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun Anggaran 2023 dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (20/8/2024) di Jakarta.

Pemerintah dengan diwakili Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun Anggaran 2023. Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (20/8) di Jakarta, Sri Mulyani kembali memaparkan beberapa capaian dalam APBN tahun 2023.

"Pada tahun 2023 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

mencatatkan beberapa capaian khusus sebagai dampak dari kinerja positif perekonomian, antara lain Keseimbangan primer yang positif pertama kali sejak 2012, Surplus Laporan Operasional pertama kali sejak penerapan basis akrual pada tahun 2015, Kenaikan ekuitas tanpa revaluasi pertama kali sejak tahun 2015," papar Sri Mulyani.

Pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, Sri Mulyani memberikan 49 poin pembahasan yang sebagian besar

merupakan rincian tanggapan atas pandangan yang diberikan fraksi-fraksi atas LKPP 2023 pada 9 Juli 2024.

"Menanggapi pandangan dari seluruh fraksi agar Pemerintah tindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK serta perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan bagi K/L yang tidak memperoleh opini WTP, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah tindaklanjuti dan berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi BPK," ujar Sri Mulyani membacakan salah satu poin yang menjadi perhatian semua Fraksi yang ada. **uc/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tertibkan Tata Niaga Cengkeh di Maluku



FOTO : GER/PDT

Anggota DPR Hendrik Lewerissa dalam rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar pada Selasa (20/8/2024).

Dalam rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar pada Selasa (20/8), Hendrik Lewerissa, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra yang mewakili daerah pemilihan Maluku, menyampaikan interupsi terkait kondisi ekonomi petani cengkeh dan pala di Maluku. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi harga jual komoditas yang kian merosot.

Hendrik menyoroti bahwa Maluku, yang pernah menjadi pusat perdagangan dunia pada abad ke-15 hingga

ke-17, kini mengalami kemunduran dalam tata niaga rempah-rempah.

"Maluku yang saya wakili adalah suatu daerah yang dalam perspektif sejarah pada abad ke-15, 16, dan 17 pernah menjadi pusat perdagangan dunia, jadi bukan Genoa atau Venesia di Italia atau Amsterdam di Belanda, tetapi di Maluku," ujarnya.

Menurutnya, pada masa itu, Maluku dikenal dengan komoditas bernilai ekonomi tinggi, karena hasil hasil tanam cengkeh dan pala. Namun, saat ini para petani cengkeh dan pala di Maluku berada dalam kondisi sulit akibat harga jual yang terus anjlok.

"Saat ini betapa merananya mereka karena harga jual cengkeh dan pala itu sangat rendah sekali, anjlok dari waktu ke waktu," tambah Hendrik.

Sebagai wakil dari Maluku, Hendrik mendesak pemerintah untuk menertibkan tata niaga cengkeh dan tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar. Ia menduga adanya praktik oligopoli dan kartel yang tidak sehat yang berdampak pada harga. "Kami menduga ada praktek oligopoli dan kartel yang tidak sehat yang dapat melakukan *price fixing* sehingga bisa menentukan harga seenaknya dan petani menjadi korban," tegasnya.

rnm/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pendaftaran Pilkada Tetap Mengacu Putusan MK



FOTO: PRIMA

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat konpers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/08/2024).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pengesahan revisi UU Pilkada yang sedianya direncanakan hari ini, Kamis (22/8) batal dilaksanakan. Karena itu, ia menegaskan aturan mengenai pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024 mendatang tetap mengacu pada dua Putusan MK terbaru tentang Pilkada, bukan pada Putusan MA.

Dua Putusan MK tersebut, pertama, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang

batas pencalonan kepala daerah. Kedua, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menetapkan usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun saat penetapan calon

"Pengesahan revisi UU Pilkada yg direncanakan hari ini tanggal 24 Agustus, batal dilaksanakan. Oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada tgl 27 Agustus nanti yg akan berlaku adalah keputusan *judicial review* MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," ujar Dasco dalam cuitan yang dikutip Parlementaria di X, Kamis (22/8).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan batalnya pengesahan revisi UU Pilkada ini sebelumnya setelah melalui mekanisme diskors pada Rapat Paripurna di DPR pada Kamis (22/8) pagi karena hanya dihadiri 176 orang anggota DPR, yang terdiri atas 89 orang hadir secara fisik dan 87 orang izin tidak menghadiri secara langsung.

Jumlah tersebut tidak memenuhi persyaratan kuorum karena kurang dari 50 persen plus 1 total jumlah anggota DPR RI sebanyak 575 anggota.

— rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Pengalihan Kuota Haji Dinilai Menyalahi Aturan



FOTO: RSB/PDT

Anggota Pansus Hak Angket Haji DPR RI John Kennedy Azis dalam Rapat dengan Dirjen Pelayanan Dalam Negeri Kemenag, di Ruang Rapat Banggar, Rabu (21/8/2024).

Anggota Pansus Hak Angket Haji DPR RI John Kennedy Azis mengatakan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terkait pengalihan kuota haji memang sudah seharusnya diusut oleh DPR. Sebab Kementerian Agama (Kemenag) sebagai penyelenggara ibadah haji telah menyalahi aturan.

“Menurut saya apapun alasan dari

Kemenag mengenai pengalihan kuota haji ini sudah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang,” tutur John dalam Rapat dengan Dirjen Pelayanan Dalam Negeri Kemenag, di Ruang Rapat Banggar, Rabu (21/8).

Sesuai aturan, pengalihan kuota haji dari reguler ke haji plus seharusnya maksimal hanya 8% dari total kuota. Namun pada penyelenggaraan ibadah haji 2024 ini, penambahan dilakukan oleh Kemenag sebanyak 50% dari total kuota haji Indonesia.

“Jika memang mau mengalihkan kuota seharusnya sesuai dengan UU yang berlaku,” tegas Politisi Partai Golkar ini.

Ia menyebut pelanggaran yang dilakukan Kemenag bukan hanya terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019, tapi juga aturan turunannya. John menilai, pengalihan kuota haji tersebut juga melanggar Keputusan Presiden (Kepres) No 6 tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M. **tn/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kemenag Jangan Zalim PHK Pekerja RS Haji Jakarta



FOTO: RSB/PDT

Anggota Komisi VIII DPR RI Obon Tabroni di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Anggota Komisi VIII DPR RI Obon Tabroni mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Agama untuk membahas polemik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Rumah Sakit Haji Jakarta.

Hal itu disampaikan Obon usai Komisi VIII menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, membahas Permasalahan Pekerja dan Pensiunan

di Rumah Sakit Haji Jakarta.

"Intinya mereka (Kemenag) yang bikin aturan. Kementerian Agama jangan zalim deh, diselesaikan masalah ini, anggaran dia gede," kata Obon di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8).

Menurutnya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam Rumah Sakit Haji bukan merupakan urusan pekerja, melainkan manajemen. Oleh karena itu, ia meminta pihak manajemen Rumah Sakit Haji untuk segera menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi di lingkungannya, termasuk

membayar tunggakan yang menjadi hak-hak pekerja.

"Negara yang bikin aturan, negara yang melanggar. Kan aturan tenaga kerja jelas, masa negara melanggar? Jangan bikin malu Kementerian Agama itu," tegasnya.

"Ya rasanya sangat zalim ketika persoalan ini muncul, kemudian tidak ada yang *take over* masalah ini, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap masalah ini, sehingga nasib mereka-mereka dari rumah sakit haji sampai dengan hari ini belum ada kejelasan," ungkap Obon. **hal/rdn**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



SERAPAN ANGGARAN PENDIDIKAN MASIH 16% DARI APBN

Komisi X DPR menyoroti tidak terserapnya anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 Rp 111 triliun. Temuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR itu dinilai miris lantaran masih banyak infrastruktur layanan pendidikan yang tidak layak.

Anggaran pendidikan memperoleh jumlah 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi UUD 1945. Namun Banggar DPR menemukan dari total APBN 2023, anggaran hanya terealisasi sebesar 16 persen. Sisanya 4 persen atau sekitar Rp 111 triliun tidak terealisasi atau tidak terserap. Secara lebih rinci, anggaran pendidikan tahun 2023 dari APBN 2023 yang terealisasi dilaporkan hanya Rp 513,38 triliun dari total anggaran Rp 621,28 triliun. Sebagian besar anggaran dialokasikan bukan untuk Kemendikbudristek melainkan ke daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) Rp 346,56 triliun atau 52,1 persen.



Dede Yusuf Macan Effendi
Wakil Ketua Komisi X DPR

"Kami sudah meminta agar Kemendikbudristek melakukan koordinasi audit bersama terkait anggaran pendidikan karena sebagian besar anggaran pendidikan tidak dikelola langsung oleh Kemendikbudristek,"

Sumber: Berbagai Sumber

WTP Jangan Sampai 'Wajar Tanpa Pemeriksaan'



FOTO: MLI/PTD

Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPKP, LKPP, Plt Kepala BPS dan Sekjen BPK RI, di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/08/2024).

Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa mengingatkan agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga benar-benar harus melalui pemeriksaan yang komprehensif. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPKP, LKPP, Plt Kepala BPS dan Sekjen BPK RI, di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

"Sepintas melihat laporannya

semuanya udah baik dan kita terima. Setelah kita terima tindak lanjutnya bagaimana untuk ke depan? Kalau bicara WTP, WTP semua ini. WTP nya jangan sampai wajar tanpa pemeriksaannya! WTP nya benar-benar (Wajar Tanpa Pengecualian) gitu," ujar Musthofa mengingatkan seraya berkelakar.

Dalam rapat dengan agenda utama Pembahasan Laporan Keuangan BPKP, LKPP, BPS, dan BPK dalam APBN Tahun Anggaran 2023 ini, Musthofa memberikan apresiasi kepada laporan keuangan empat instansi tersebut. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini

mengatakan bahwa laporan keuangan dan pembahasan pagu anggaran adalah siklus yang terus berulang. Untuk itu yang lebih penting adalah pengaplikasian tugas pokok dan fungsi baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum terlaksana.

Pada kesempatan tersebut, Musthofa juga sempat menyinggung "persaingan" antara BPK dan BPKP dalam ranah yang positif. Meski begitu, ia memuji BPKP yang dianggap tetap mampu memberikan performa baik dengan keterbatasan anggaran.

 **uc/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Perlu Kreativitas Ciptakan Ruang Fiskal



FOTO: MUN/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024) di Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyatakan bahwa perlu adanya kreativitas dalam memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan baru. Menurutnya dengan beban utang dan beban pembiayaan lainnya, maka dapat membatasi gerak pemerintahan baru dalam menjalankan visi-misi mereka.

“Kalau lihat postur APBN sekarang hampir tidak memungkinkan visi misi Pak Prabowo itu bisa dilaksanakan 100 persen. Karena apa? Karena terbeban

biaya utang; kedua, terbeban IKN, yang ketiga terbeban oleh (program) makan siang gratis sehingga kreativitas untuk melakukan anggaran terhadap visi misi itu hampir dipastikan sangat mi-nim,” kata Fauzi dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8) di Senayan, Jakarta.

Fauzi yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI ini lantas meminta pemerintah juga kreatif dalam mendorong pendapatan negara.

“Oleh sebab itu harus ada kreativitas,

apakah pendapatan negara digenjot? Apakah PNPB kita digenjot? ataukah utang Pak Suminto diperbanyak lagi utangnya?” katanya seraya berkelakar pada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto.

Fauzi mengingatkan bahwa selain utang negara, ada juga utang untuk pembiayaan kekayaan negara yang dipisahkan. Ia menilai rasio utang masih terhitung normal namun ia juga mengingatkan adanya sejumlah utang jatuh tempo. **uc/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Bentuk Panja RUU P2 APBN 2023



FOTO: JKA/PDT

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam foto bersama usai memimpin Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan di Gedung Nusantara II.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akan membentuk dua Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (RUU P2 APBN). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat memimpin Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (20/8).

“Kita nanti akan pendalaman di panja-panja, untuk itu saya minta persetujuan kepada semuanya. Kita akan bikin dua Panja, yaitu Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draft RUU. bisa disetujui?” tanya Cucun dan dijawab setuju dari para anggota dewan yang hadir.

Sebelumnya, pada rapat tersebut disampaikan pokok-pokok keterangan pemerintah atas RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2023 oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Nantinya pemerintah juga akan menunjuk pejabat untuk mewakili pemerintah di dalam Panitia

Kerja perumus kesimpulan dan Panja draf RUU yang akan membahas secara detail hal hal yang berkaitan dengan RUU P2 APBN 2023.

Diakhir rapat, Cucun menjelaskan bahwa pendalaman pada dua panitia kerja terkait RUU P2 APBN akan dilaksanakan pada Senin mendatang (26/8/2024). Sedangkan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan akan kembali dijadwalkan pada Rabu mendatang (28/8/2024). RUU P2 APBN 2023 sendiri ditargetkan akan bisa dibahas di Rapat Paripurna DPR RI di awal September 2024.

uc/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Manfaatkan Potensi Ekonomi, Percepat Kemajuan Kedua Pihak



FOTO: OJI/PDT

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, dalam sambutan pembukaannya Forum Parlemen Indonesia-Afrika (Indonesia-Africa Parliamentary Forum) akan berlangsung di Bali pada 31 Agustus hingga 3 September 2024 di Ruang Duta Besar, Gedung Nusantara III, DPR RI, pada (15/8/2024).

Forum Parlemen Indonesia-Afrika (IAPF) akan berlangsung di Bali pada 31 Agustus hingga 3 September 2024. Dengan tema “Memperkuat Kemitraan Parlemen Indonesia-Afrika untuk Pembangunan,” forum ini diharapkan menjadi batu loncatan dalam mempererat kerja sama antara parlemen Indonesia dan Afrika, serta merancang rencana kerja sama jangka panjang yang komprehensif untuk pembangunan bersama.

Ketua Badan Kerja Sama Antar

Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, dalam sambutan pembukaannya di Ruang Duta Besar, Gedung Nusantara III, DPR RI, pada (15/8), menekankan pentingnya hubungan historis antara Indonesia dan Afrika yang telah terjalin sejak Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok tahun 1961. Hubungan ini didasarkan pada nilai-nilai solidaritas dan anti-kolonialisme, yang dikenal sebagai semangat Bandung.

Dalam sambutannya, Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki hubungan diplomatik

yang baik dengan 54 negara di Afrika. Di bidang hubungan antar-parlemen, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti IPU dan PUIC. Baru-baru ini, delegasi DPR RI telah melakukan kunjungan diplomatik ke Namibia, Tanzania, dan Zimbabwe pada awal Juni 2024 untuk memperkuat kerja sama parlemen.

Forum Parlemen Indonesia-Afrika ini akan terdiri dari tiga sesi diskusi yang membahas isu-isu penting, seperti kerja sama negara global selatan untuk kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan. **— sb/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



PROGRAM
TNR
PARLEMEN

KABAR
NUSANTARA

09.30 & 15.30 WIB.
Senin, Rabu & Jumat.

HOUSE
NEWS

08.00 WIB.
Senin s.d Jumat.

PEREMPUAN
Parlemen
Maju terus perempuan indonesia

10.00 WIB.
Senin s.d Jumat.

DARI
RUANG
SIDANG

11.00 & 13.30 WIB.
Senin s.d Jumat.

SAKSIKAN HANYA DI

<https://tvrparlemen.dpr.go.id/>

SCAN
HERE!!

